



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

APBN 2025: TRANSISI PEMERINTAHAN DAN TANTANGAN EKONOMI

Ariesy Tri Mauleny

Analisis Legislatif Ahli Madya
ariesy.mauleny@dpr.go.id

Muhammad Insan Firdaus

Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.firdaus2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2025 yang telah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI, menandai awalnya era pemerintahan Prabowo Subianto. APBN 2025 dirancang dengan mempertimbangkan transisi kepemimpinan dan tantangan ekonomi global yang berkelanjutan. Postur APBN 2025 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun, dengan belanja negara Rp3.621,31 triliun, sehingga menghasilkan defisit anggaran 2,53% terhadap PDB.

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi ditetapkan pada level 5,2%, sebuah angka yang ambisius mengingat selama lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak beranjak dari level 5%. Pemerintah baru menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai target ini, terutama karena adanya tekanan pada konsumsi masyarakat sebagai kontributor terbesar PDB. Program *quick win* makan bergizi gratis dengan alokasi Rp71 triliun belum cukup mendongkrak, karena kontribusinya terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan hanya sekitar 0,1% dari PDB.

Selain program *quick win* makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, pembangunan rumah sakit di daerah Rp1,8 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi Rp4 triliun, dan program ketahanan pangan Rp15 triliun, seluruhnya menjadi bagian dari program *quick win* dengan total anggaran Rp115 triliun. Untuk mengakomodasi program-program ini, maka setoran PNBPN ditargetkan meningkat Rp8,26 triliun dari rencana sebelumnya Rp505,38 triliun, sehingga mencapai Rp513,64 triliun. Peningkatan Rp8,26 triliun direncanakan bersumber dari kenaikan dividen BUMN sebesar Rp4 triliun dan PNBPN beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) Rp4,26 triliun.

Namun demikian, terdapat kekhawatiran terkait dengan alokasi belanja K/L tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan *outlook 2024* sebesar Rp1.160,09 triliun. Kekhawatiran tersebut adalah bagaimana pemerintah akan mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai target-target prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pada setiap K/L, dengan efisiensi anggaran sebesar itu. Apakah kemungkinan restrukturisasi dan optimalisasi kinerja birokrasi dapat menjadi alternatif langkah lanjutan yang menjadi solusinya? Meski demikian, kebutuhan akan fleksibilitas APBN 2025 dalam mengantisipasi perubahan struktur pemerintahan, sudah cukup terakomodir. Anggaran cadangan untuk kemungkinan penambahan kementerian pun telah disiapkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari ketidakpastian global. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyoroti peran APBN dalam merasionalisasi aspirasi politik untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Namun pada hakekatnya, APBN 2025 harus

mencerminkan upaya menjaga kesinambungan fiskal sambil mendukung agenda prioritas pembangunan.

Dengan target ambisius mengurangi pengangguran hingga 4,5-5%, menurunkan kemiskinan menjadi 7-8%, dan menghapus kemiskinan ekstrem menunjukkan komitmen terhadap agenda pembangunan inklusif. Namun, pencapaian target-target ini akan memerlukan tidak hanya alokasi anggaran yang tepat, tetapi juga implementasi kebijakan yang efektif dan sinergi antarsektor.

Kesepakatan APBN 2025 di tengah transisi pemerintahan menunjukkan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan program pembangunan. Namun, implementasi yang efektif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan tahun pertama pemerintahan baru. Dengan defisit anggaran yang melebar hingga mendekati batas aman 3% terhadap PDB, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola keuangan negara sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Atensi DPR

Tantangan dan peluang yang tercermin dalam APBN 2025 menunjukkan kompleksitas tugas yang dihadapi pemerintahan baru. Terdapat kebutuhan untuk memberikan stimulus ekonomi yang signifikan guna mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Terdapat pula tuntutan untuk tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas makroekonomi. Keseimbangan antara kedua aspek ini akan menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPR RI khususnya Komisi XI perlu mengambil beberapa langkah strategis, yaitu dengan melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi APBN 2025, terutama terkait program-program prioritas pemerintah baru. Komisi XI perlu memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program *quick win* seperti makan bergizi gratis dan pemeriksaan kesehatan gratis digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Komisi XI juga perlu mengadakan rapat kerja rutin dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan ekonomi, mengidentifikasi potensi risiko, dan mengusulkan penyesuaian kebijakan jika diperlukan.

Sumber

antaranews.com, 17 September 2024;

Bisnis Indonesia, 18 September 2024;

Kompas, 20 September 2024;

Kontan, 19 September 2024;

Rakyat Merdeka, 18 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetyawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.